

2
0
1
9

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan *good governance*. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;

3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2019 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Sampang, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. DJUWARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19600707 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	3
B. TUGAS DAN FUNGSI	5
C. ISU STRATEGIS	16
D. CASCADING KINERJA	18
E. PETA PROSES BISNIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA	27
B. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP	40
A. TINJAUAN UMUM	40
B. TINJAUAN KHUSUS	40
C. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	41
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	42
E. SARAN DAN REKOMENDASI	42
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perubahannya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah menyusun sebuah laporan guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan *self-assessment* (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (*feed back*) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

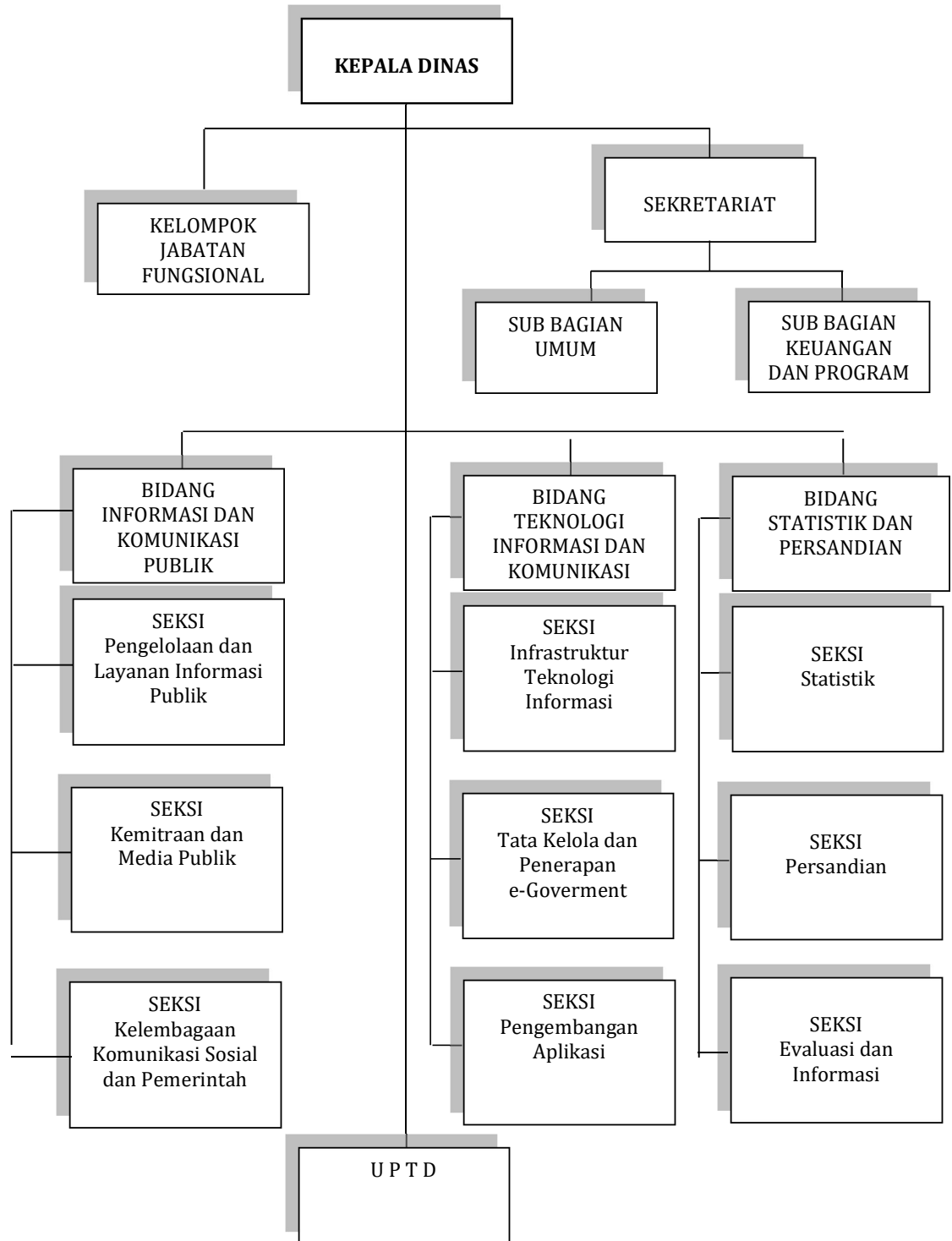
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang;
2. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG**



B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang terbagi secara terinci yang terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perencanaan, perumusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi media publik dan opini publik;
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan nasional/daerah;
- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian kelompok informasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media lokal, media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

- 1) Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan, perumusan, pelaksanaan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - b. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi dan opini publik serta analisis isu publik;
 - c. Melaksanakan Koordinasi kelembagaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten guna mendapatkan bahan sajian layanan informasi publik;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP); dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Seksi Kemitraan dan Media Publik, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang;
 - b. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi secara langsung (*Interpersonal communication*);
 - c. Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui penyertaan pameran/promosi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kemitraan lembaga komunikasi publik;
 - e. Melaksanakan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
 - f. Melaksanakan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- 3) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah , mempunyai tugas :
- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan Pengembangan, pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial dan media tradisional (pentura);
 - d. Memfasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di masyarakat;
 - e. Melaksanakaan kebijakan komunitas komunikasi berdasarkan kesetaraan gender;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi jaringan komunikasi pemerintah dan masyarakat; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Keamanan Data Pemerintah Kabupaten Sampang;
- d. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi *generik, spesifik* dan Suplemen yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*;
- g. Pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;
- i. Pelaksanaan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Sampang;
- j. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

- 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan infratraktur teknologi informasi;
 - b. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
 - c. Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - d. Melaksanakan pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* Pemerintah Kabupaten Sampang dan menetapkan *sub domain* semua organisasi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana infrastruktur teknologi informasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - f. Melaksanakan pengelolaan dan distribusi *bandwidth* internet ke setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - g. Melaksanakan pengelolaan Tim *Disaster Recovery Center*;
 - h. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan *ekosistem Smart City* di Kabupaten Sampang; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 2) Seksi Tata Kelola dan Penerapan e-Government, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Tata Kelola e-Government;
 - b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Tata Kelola e-Government;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;
- d. Melaksanakan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *egovernment*;
- e. Menyusun bahan kerjasama antara satuan kerja, antar pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dan non pemerintah;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan spesifikasi teknis pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *egovernment* dan *smart city*;
- h. Melaksanakan promosi *smart city*;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3) Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan aplikasi teknologi informasi;
- b. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perangkat lunak teknologi informasi;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- e. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

- g. Melaksanakan layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Sampang;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, *Government Chief Information Officer (GCIO)*; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian persandian, statistik, evaluasi dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan persandian;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi persandian;
- e. Pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

- 1) Seksi Statistik, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan statistik;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
- d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pembangunan Kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan statistik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

2) Seksi Persandian, yang mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian;
- c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan persandian;
- d. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil persandian;
- g. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat persandian serta mengembangkan sistem dan alat-alat persandian;
- h. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- i. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

3) Seksi Evaluasi dan Informasi, yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan informasi data pembangunan Kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
- d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya evaluasi dan informasi;
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya penguatan evaluasi dan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan evaluasi dan informasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS

Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e-Government. Tantangan utama pengembangan e-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Sehubungan dengan pengembangan e-government langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini website Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan design tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap ter-update. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini dengan alamat www.sampangkab.go.id.

Berdasarkan kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik kiranya berbagai hambatan yang timbul antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut

dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	1. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD 2. konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website 3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat	Faktor Internal: Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan website OPD yang memenuhi standar konten dan integrasi data
2.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti sudah tercapai 100% namun dalam pelayanan PPID masih konvensional belum berbasis TIK	Pelayanan PPID belum berbasis TIK	Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan pelayanan PPID berbasis TIK Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public yang berbasis TIK
3.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebaran media informasi sudah tercapai 100% namun media informasi belum berbasis TIK	Media informasi belum berbasis TIK	Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan media informasi berbasis TIK Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memanfaatkan TIK
4.	Persentase KIM berbasis TIK sudah tercapai 70% namun website belum sepenuhnya aktif	Website sebagai media informasi KIM belum optimal	Faktor Internal: Belum memanfaatkan secara optimal potensi komunikasi yang ada di masyarakat Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TIK
5.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu sudah mencapai 100% namun dalam publikasi data statistic belum berbasis TIK	Publikasi data statistic belum berbasis TIK	Faktor Internal: Keterbatasan SDM yang berbasis TIK Faktor Eksternal: Data sektoral di Perangkat Daerah belum berbasis TIK

D. CASCADING KINERJA

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Gambar 1.1
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang



Tabel 3.2
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang

INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN
Indeks SPBE	1. Meningkatnya PD yang menerapkan e-gov	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	Program Pengembangan Teknologi Informasi	Terwujudnya pelaksanaan pengembangan teknologi informasi	1. Persentase sistem informasi perangkat daerah yang terintegrasi	1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	- Jumlah bandwidth - Jumlah penambahan jaringan - Jumlah perawatan jaringan - Jumlah konsultan jaringan

		Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi				2. Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government	Terwujudnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government	- Jumlah peserta bimtek untuk aparatur dan masyarakat - Jumlah jasa konsultansi - Jumlah berita yg diupload
					2. Jumlah pengunjung Website Kabupaten	3. Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	Terwujudnya pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	- Jumlah Aplikasi dan website yang memenuhi standar TI
	2. Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya Fasilitasi pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase PPID Pembantu dengan kinerja baik	1. Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	- Jumlah Peserta Sosialisasi/Pembinaan PPID- Jumlah Pendampingan PPID
						2. Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	- Jumlah pameran pembangunan - Jumlah Talkshow - Jumlah eksemplar tabloid - Jumlah siaran keiling - Jumlah siaran on air - Pengadaan Alat Radio - Operasional LPLP - Jumlah ADV (media cetak dan elektronik)
					2. Persentase KIM berbasis IT	3. Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	- Jumlah KIM yang dibina dan difasilitasi
		Persentase data statistik yang di publikasikan dan tepat waktu	Program Statistik dan Pengolahan Data	Terwujudnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dan Pengolahan Data Sektoral	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	1. Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik	Terwujudnya Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik sektoral	Jenis dokumen statistik (Kabupaten dlm Angka, Kecamatan dlm Angka, Susenas dan PDRB Kabupaten)
						2. Evaluasi Data dan Informasi	Terwujudnya pelaksanaan Evaluasi Data dan Informasi	- Jumlah laporan evaluasi yang disusun - Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2019

E. PETA PROSES BISNIS

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta

proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

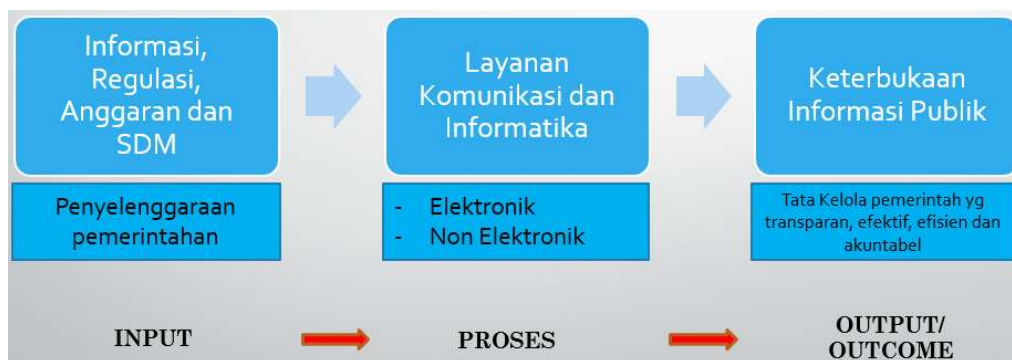
Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

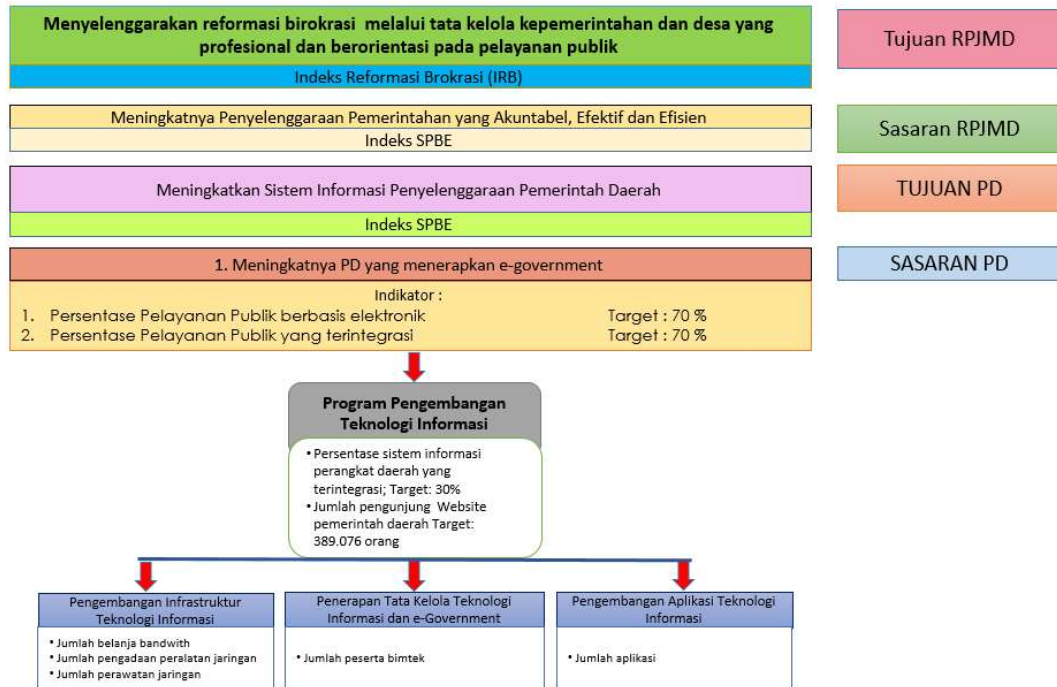
Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang :

Gambar 1.2

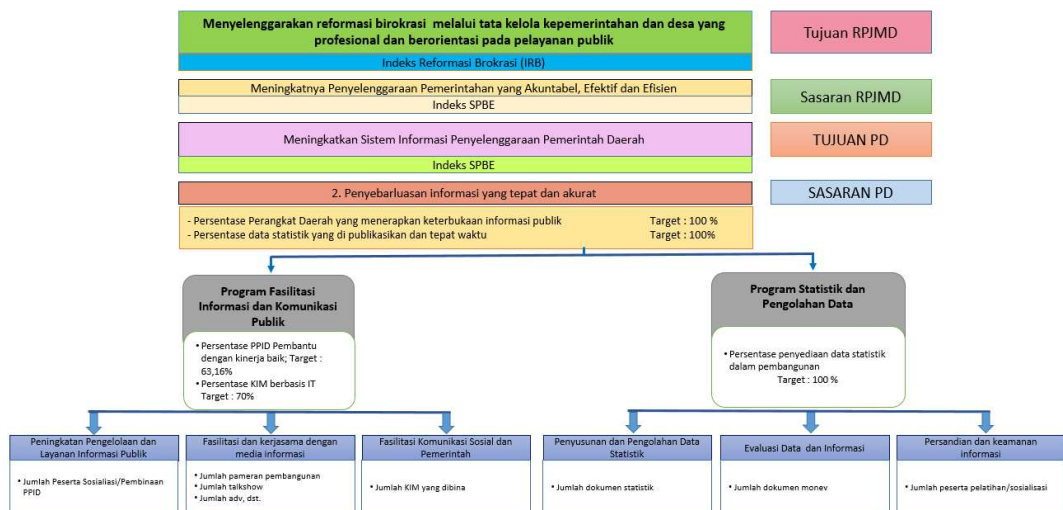
Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang



Gambar 1.3
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang



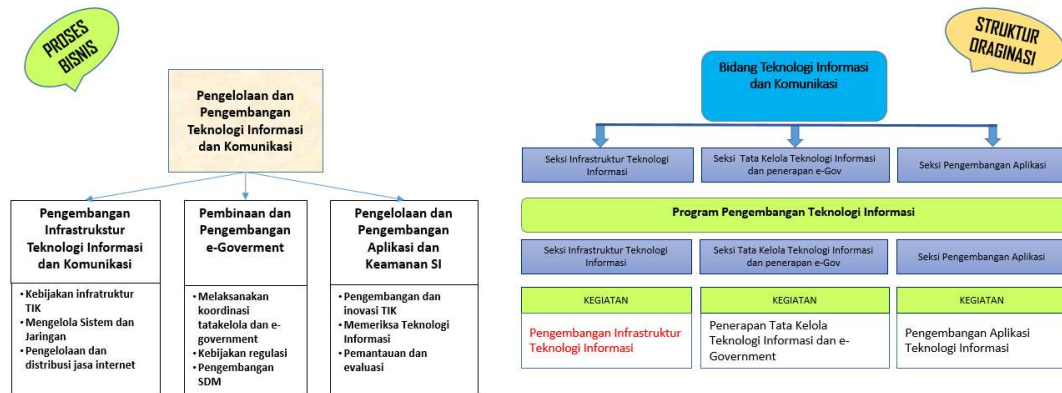
Gambar 1.4
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang



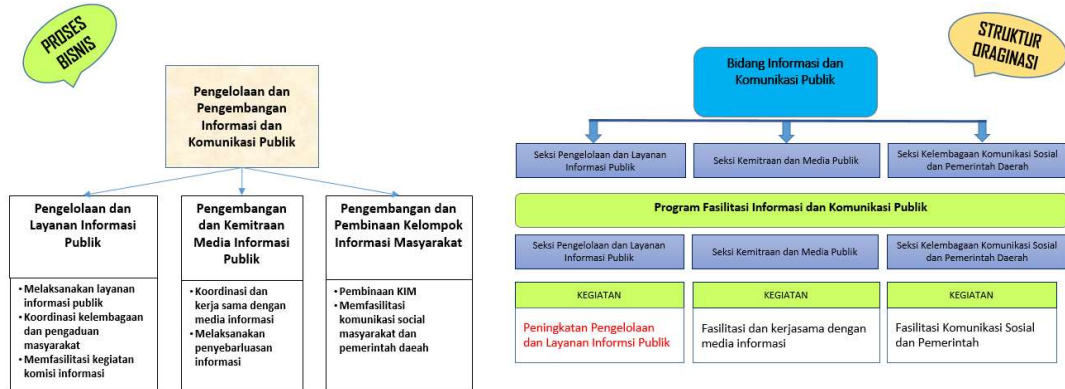
Gambar 1.5
Inti Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang



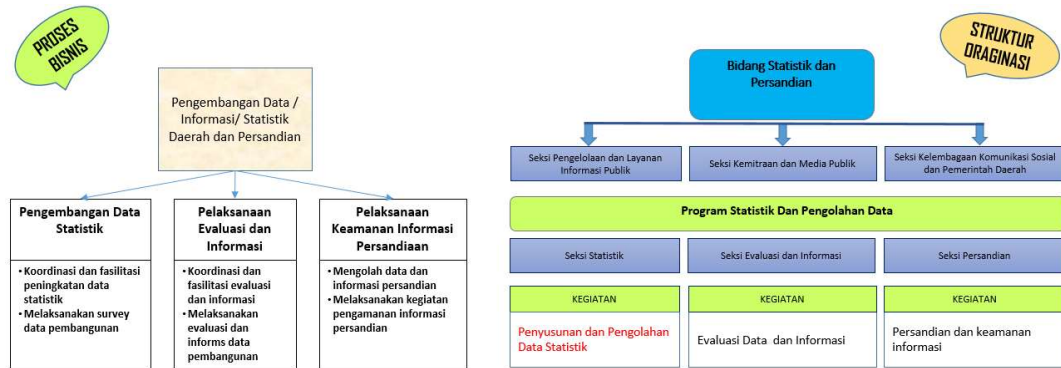
Gambar 1.6
Perbandingan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Bidang TIK)



Gambar 1.7
Perbandingan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Bidang IKP)



Gambar 1.8
Perbandingan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Bidang Statistik dan Persandian)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	%	70
		Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	%	70
2	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	%	100
		Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	%	100

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2019 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019 tersaji dalam Lampiran-1.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 8.530.686.150 yang digunakan untuk melaksanakan 18 kegiatan yang terangkum dalam 7 pogram sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2019

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
a.	Program Pengembangan Teknologi Informasi	3,895,100,000.00
b.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	796,120,000.00
c.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430,690,000.00
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81,450,000.00
e.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	46,000,000.00
f.	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik	3,108,617,000.00
g.	Program Statistik dan Pengolahan Data	172,709,150.00
	Jumlah	8,530,686,150.00

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2019 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	5,249,360,000.00
2	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	3,281,326,150.00
	Jumlah	8,530,686,150.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Dalam penjabaran akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2019 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2019 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut

didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	70%	67,86%	96,94%
		Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	70%	36,84%	52,63%
2	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	70,8%	70,8%
		Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Masing – masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaian, dapat dijelaskan aspek keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government

Dijabarkan dalam 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik berbasis elektronik
2. Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	46%	70%	67,86%	96,94%
2		Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	54%	70%	36,84%	52,63%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator 1 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 96,94% dan Indikator 2 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 52,63%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - Pada Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, semua SKPD (Dinas/Badan dan Kecamatan) Sudah terkoneksi 100%. Kendala saat ini masih ada trouble di ISP, daya listrik di server sering mati, putusnya kabel FO. sering trouble perangkat wireless di setiap SKPD mengalami penurunan kinerja dikarenakan faktor

usia dan penurunan performa perangkat wireless. Adanya server induk yang tidak berada dalam satu kantor Diskominfo menjadikan pengelolaan server menjadi kurang optimal dan distribusi bandwidth yang hanya 63 mbps masih jauh dari kondisi ideal. Dan SDM dibidang TI kurang sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak maksimal.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan perangkat jaringan yang ada dengan melakukan perbaikan secara berkala sehingga tidak mengurangi fungsi dari peralatan tersebut, melakukan pembagian bandwidth tiap OPD secara proporsional sesuai dengan kebutuhan OPD, memaksimalkan SDM yang ada untuk menangani permasalahan terkait jaringan dan website

- Pada kegiatan Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government untuk aspek kebijakan dan tata kelola sudah baik, sedangkan untuk aspek layanan belum sepenuhnya layanan publik terintegrasi. Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan meningkatkan koordinasi untuk mengintegrasikan layanan publik yang ada.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

- Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :

- Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan penambahan jaringan setiap tahunnya, pemeliharaan website dan pengamanan aplikasi untuk website.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat

Dijabarkan dalam 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi public
2. Persentase data statistik yang di publikasikan dan tepat waktu

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	68%	100%	70,8%	70,8%
2		Persentase data statistik yang di publikasikan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 85,4%, yang mempunyai makna Berhasil. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - Pada Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik untuk masih ada OPD yang belum memahami mekanisme pelayanan informasi public, Kurangnya Sarana dan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat di lingkungannya
 - Pada Program/Kegiatan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, semua dokumen statistik daerah dapat terpenuhi antara lain : Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, Tinjauan Ekonomi dan PDRB. Penyusunan data statistik masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, sehingga pelaksanaan kegiatan

penyusunan data statistik menunggu kesiapan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang

- Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait sehingga kegiatan penyusunan data statistik bisa disiapkan lebih awal
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 - Sumber daya manusia yang terbatas di Bidang Statistik dan Persandian sehingga menggunakan staf di bidang yang lain
 3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - Program/Kegiatan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan melaksanakan penyusunan data statistik yang tepat waktu.

A. REALISASI ANGGARAN

Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2019 sebesar Rp. 8.530.686.150,-. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai target.

Pada tabel berikut disajikan persentase Anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	5.249.360.000,00	61,54%
	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi		
Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	3.281.326.150,00	48,46%
	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan		
JUMLAH		8.530.686.150,00	100%

Pada tabel berikut disajikan Realisasi Pendapatan pada masing-masing sasaran.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	5.249.360.000,00	5.223.289.567,00	99,50%
Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	3.281.326.150,00	2.604.221.190,00	79,36%
JUMLAH	8.530.686.150,00	7.827.510.757,00	91,76%

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	70%	100%	143%	5.249.360.000,00	5.223.289.567,00	99,50%
	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	70%	70%	100%			
Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	70,8%	70,8%	3.281.326.150,00	2.604.221.190,00	79,36%
	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100%			
JUMLAH					8.530.686.150,00	7.827.510.757,00	91,76%

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	143%	99,50%	20,28%
	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	100%		
Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	70,8%	79,36%	2,58%
	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%		

Tabel 3.8
Pencapaian Realisasi ProgramKegiatan

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PENDAPATAN	10,000,000.00	11,240,000.00	112%
	Lain-lain PAD yg sah : fasilitas sosial dan fasilitas umum	10,000,000.00	11,240,000.00	112%
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,776,534,400.00	2,513,551,204.00	90.53
B	Belanja Langsung (BL)	8,515,686,150.00	7,812,510,757.00	91.74
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	Program Pelayanan Administrasi	796,120,000.00	788,932,060.00	99.10
1.1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	284,044,000.00	277,067,360.00	97.54
1.2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	130,726,000.00	130,711,000.00	99.99
1.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	381,350,000.00	381,153,700.00	99.95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430,690,000.00	429,509,100.00	99.73
2.1	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	50,450,000.00	50,169,100.00	99.44
2.2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	86,940,000.00	86,040,000.00	98.96
2.3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293,300,000.00	293,300,000.00	100.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	81,450,000.00	80,135,000.00	98.39
3.1	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	81,450,000.00	80,135,000.00	98.39

4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan,	31,000,000.00	30,960,000.00	99.87
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	16,000,000.00	15,980,000.00	99.88
4.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15,000,000.00	14,980,000.00	99.87
5	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi	3,108,617,000.00	2,432,721,190.00	78.26
5.1	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	67,600,000.00	53,157,800.00	78.64
5.2	Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	2,829,120,000.00	2,185,875,250.00	77.26
5.3	Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	211,897,000.00	193,688,140.00	91.41
6	Program Pengembangan Teknologi	3,895,100,000.00	3,878,753,407.00	99.58
6.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	3,523,500,000.00	3,512,283,235.00	99.68
6.2	Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government	261,600,000.00	258,030,172.00	98.64
6.3	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	110,000,000.00	108,440,000.00	98.58
II URUSAN STATISTIK DAN PERSANDIAN				
7	Program Statistik dan Pengolahan Data	172,709,150.00	171,500,000.00	99.30
7.1	Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik	137,456,500	136,505,000.00	99.31
7.2	Evaluasi Data dan Informasi	35,252,650.00	34,995,000.00	0.00
JUMLAH (BL+BTL)		11,292,220,550.00	10,326,061,961.00	91.44

Tabel 3.9
Output/Keluaran masing-masing Program dan Kegiatan

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Output/Keluaran			
		Uraian	Target	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100%
B	Belanja Langsung (BL)				
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	108%	108%
1.1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat terkirim	900 surat	911 surat	101%
		Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air,	12 bln	12 bln	100%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	28 unit	28 unit	100%
		Jumlah alat kebersihan yang disediakan	868 bh	1552 bh	179%
		Jumlah tenaga kebersihan	84 OB	84 OB	100%
		Jumlah tenaga honorer	42 OB	42 OB	100%
1.2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan ATK	33 jenis	33 jenis	100%
		Jumlah penggandaan	70000 lbr	59624 lbr	85%
		Jumlah barang cetakan	9 jenis	9 jenis	100%
		Jumlah komponen listrik	14 jenis	14 jenis	100%
		Jumlah pemenuhan bahan bacaan	96 eks	96 eks	100%
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan	660 OK	90 OK	14%
1.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat dalam daerah	104 OK	126 OK	121%
		Jumlah rapat luar daerah	130 OK	199 OK	153%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
2.1	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
2.2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	3 unit	100%
2.3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	90 unit	90 unit	100%
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	159 unit	122 unit	77%
		Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang	40 unit	50 unit	125%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
3.1	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	5 org	5 org	100%

4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	100%	100%
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dok	1 dok	100%
4.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan kinerja	1 dok	1 dok	100%
		Jumlah dokumen Renja	1 dok	1 dok	100%
		Jumlah dokumen RKA	1 dok	1 dok	100%
4.3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen DPA	1 dok	1 dok	100%
		Jumlah dokumen IKM	1 dok	1 dok	100%
		Jumlah penyebaran informasi publik yang diikuti	1 kali	1 kali	100%
5	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID Pembantu dengan kinerja baik	63,16%	71%	112%
		Persentase KIM berbasis IT	70%	54%	77%
5.1	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Jumlah peserta sosialisasi	60 orang	60 orang	100%
5.2	Fasilitasi dan kerjasama dengan media informasi	Jumlah pameran pembangunan	1 kali	0 kali	0%
		Jumlah talkshow	1 kali	0 kali	0%
		Jumlah tabloid Trunojoyo	6.000 eksplr	6.000 eksplr	100%
		Jumlah siaran keliling	12 kali	12 kali	100%
		Jumlah siaran on air	3 keg	3 keg	100%
		Jumlah dialog interaktif radio	12 kali	12 kali	100%
		Jumlah pengadaan peralatan radio	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah operasional LPPL	12 bulan	3 bulan	25%
		Jumlah pemuatan berita/adv media cetak dan elektronik	234 kali	457 kali	195%
5.3	Fasilitasi Komunikasi Sosial dan Pemerintah	Jumlah KIM yang dibina	28 KIM	28 KIM	100%
6	Program Pengembangan Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang terintegrasi	30%	53,5%	178%
		Jumlah pengunjung Website sampangkab.gp.id (orang)	389,070	394,272	101%
6.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	-Jumlah belanja bandwidth	12 bln	12 bln	100%
		-Jumlah pengadaan perlatan jaringan	1 paket	1 paket	100%
		-Jumlah perawatan jaringan	31 unit	31 unit	100%
		-Jumlah konsultan jaringan	1 paket	1 paket	100%
6.2	Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan e-Government	Jumlah peserta bimtek	180 orang	180 orang	100%
6.3	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%

II	URUSAN STATISTIK DAN PERSANDIAN				
7	Program Statistik dan Pengolahan Data	Persentase penyediaan data statistic dalam pembangunan	100%	100%	100%
7.1	Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik	Jenis dokumen statistik (Kabupaten dlm Angka, Kecamatan dlm Angka, Susenas dan PDRB Kabupaten)	4 dok	4 dok	100%
7.2	Evaluasi Data dan Informasi	Laporan Monev yang disusun	1 dok	1 dok	100%

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas kepada Publik berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sasaran Strategis dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2019. Selain itu LKjIP ini disusun sebagai media pembelajaran bagi Dinas atas segala kinerja dan prestasi maupun kegagalan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk hambatan maupun perubahan yang pasti dihadapi dimasa yang akan datang, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal diatas, maka wajar kiranya jika sikap responsif dan adaptif serta terbuka akan kritik maupun saran yang bersifat membangun selalu dikemukakan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini berisikan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menuangkan dalam penetapan tujuan dan,

sasaran dan indikator kinerja dan berpedoman pada Renstra 2019-2024 secara obyektif sekaligus menginformasikan capaian-capaian yang telah diraih secara transparan, logis dan akuntabel. Keseluruhan informasi akuntabilitas ini merupakan hal yang bersifat berkelanjutan (progresif) sehingga perlu secara terus-menerus dikaji, dikembangkan dan dievaluasi agar nantinya dapat diperoleh perangkat-perangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan logis serta didukung oleh pemberdayaan sumber daya yang ada.

Pengembangan sistem akuntabilitas ini nantinya secara teknis diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Dinas sendiri terhadap pelaksanaan tugas dan pengendalian fungsi-fungsi dinas secara menyeluruh yang akhirnya akan menjadi media yang efektif bagi pemerintah daerah maupun pimpinan untuk melihat dan menilai sampai sejauh mana keputusan-keputusan Strategis dinas mampu mengcover tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang,

C. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sebagaimana berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang belum optimal;
2. Jangkauan internet yang belum sampai ke desa;
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah mengelola websitenya;
4. Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik dan terintegrasi;
5. Data statistic belum berbasis website/elektronik.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui kegiatan dialog interaktif dan penerbitan/media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah, leaflet, brosur dll) serta media luar ruang (baliho, spanduk dan lain-lain);
2. Melakukan penambahan jaringan sehingga menjangkau desa dan pelayanan publik lainnya;
3. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan update data/informasi pada website <https://sampangkab.go.id>;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbasis elektronik dan terintegrasi;
5. Meningkatkan kualitas data statistik dengan berbasis website/elektronik.

E. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Saran :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sesuai tugas pokoknya menangani 3 (tiga) urusan wajib yaitu urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik dan urusan persandian, oleh karena itu perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

2. Rekomendasi

Agar peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara on line

dengan dukungan Teknologi Informasi di Kabupaten Sampang, maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang proporsional, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampang, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB.SAMPANG

Drs. H. DJUWARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19600707 198603 1 022